

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Majene)**

Nur Waina Fattah



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR WAINA FATTAH
A031191151**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)

Disusun dan diajukan oleh

NUR WAINA FATTAH
A031191151

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Maret 2023

Pembimbing I,



Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc.,
Sc., Ak., CA
NIP 19670319 199203 2 003

Pembimbing II,



Muhammad Istiyansyah Ulman Idris,
S.E., M. Sc., CRA., CRP
NIP 19941021 202107 03 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)

disusun dan diajukan oleh

Nur Waina Fattah
A031191151

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 13 April 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji

1. Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc., Sc., Ak., CA
2. Muhammad Istiyansyah Ulman Idris, S.E., M. Sc., CRA., CRP
3. Prof.Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
4. Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS,CSRA

Jabatan Tanda Tangan

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Waina Fattah

NIM : A031191151

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diskuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan an daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 24 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Waina Fattah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan yang maha esa, Tuhan yang memberikan cahaya setelah kegelapan, yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* yang telah memperjuangkan Islam, menjadi suri teladan bagi seluruh umat, serta para keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan seluruh umat yang senantiasa *istiqomah* di atas jalan-Nya.

Tak henti-hentinya peneliti mengucapkan syukur kepada Allah *subahanu wa ta'ala*, karena berkat rahmat, hidayah dan ridho-Nya, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal dari peneliti, melainkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Drs. H. A. Fattah Katta, M.M. dan Ibunda tercinta Dra. Hj. Namirah Saleh, M.H., yang telah berjuang dengan sepenuh hati untuk dapat membesarkan dan mendidik peneliti hingga saat

ini serta telah memberikan penuh dukungan dan doa untuk semua anak-anaknya sedari kecil hingga menjalani kehidupan seperti yang sekarang. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang selalu mendukung dan percaya dengan segala bentuk keputusan dan keinginan peneliti hingga hari ini dan senantiasa memberikan segala hal yang terbaik untuk anaknya selama menempuh pendidikan hingga saat ini. Terimakasih peneliti ucapkan karena telah menjadi orang tua yang hebat yang dititipkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada peneliti.

2. Kakak dan Saudari Kembar yang tersayang, Apt. Nur Ainiah, S.Si., Muh. Fursan Fattah, ST., Muh. Furqan Fattah, Lc., dan Nur Wina Fattah, S.Ked. Terima kasih telah menjadi kakak dan saudari kembar yang sangat hebat dimana selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti hingga hari ini dan menjadi penyemangat peneliti dalam setiap hal hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., M.Soc., Sc., Ak., CA selaku dosen pembimbing I, Bapak Muhammad Istiyansyah Ulman Idris, S.E., M. Sc., CRA., CRP selaku dosen pembimbing II yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta petunjuk yang terbaik kepada peneliti selama mengenal bangku perkuliahan dan terkhususnya lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh jenjang pendidikan Strata 1 (S1), dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA, CSRS, CSRA yang senantiasa membimbing dan memberikan nasehat kepada peneliti.

5. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dari awal memasuki perkuliahan hingga selesai.
6. Bapak H.A. Achmad Syukri, SE., M.M. dan Arismunandar, S.STP., M.M. selaku Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene serta segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene. Terima kasih telah menerima dan mengarahkan peneliti selama proses penyelesaian penelitian.
7. Saudara Muh. Alam Rifai, SE yang telah membantu peneliti selama proses penyelesaian studi dan skripsi ini.
8. Saudara tak sedarah peneliti selama di bangku SMA hingga saat ini. Nana, Fia, Ilmi, Najwa, Innaya, Lainun, Libra, Gina dan Jirana. Terima kasih karena telah menjadi *supporting system* peneliti, telah senantiasa mendukung, mengarahkan dan menasehati peneliti dalam setiap perjalanan.
9. Saudara tak sedarah peneliti selama di bangku kuliah. Farhan, Izzah, Alma, Ainun, Onet, Arnez, dan Jasmine. Terima kasih karena telah menjadi *supporting system* peneliti, telah memberikan kenangan dan senantiasa mendukung, menasehati peneliti dalam setiap perjalanan di dunia perkuliahan.
10. Tempat bertumbuh dan tempat belajar peneliti selama kuliah, Hml Komisariat Ekonomi. Kak Jihan, Kak Lulu, Kak Yassin, Kak Ifan, Kak Rahmat, Kak didit, Opet, Kak Tia, Winda, Kartika, dan Ari serta Keluarga besar Hml Komisariat Ekonomi yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan yang terjalin selama ini.

11. Kakak, Adik, dan teman-teman serta keluarga besar IMA FEB-UH, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada peneliti dalam berproses.
12. Teman-teman angkatan Akuntansi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang disebut 19NITE yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman-teman yang memberikan banyak kesan kepada peneliti selama perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah yang dapat memberatkan amalan baik di akhirat kelak. Aamiin yaa Rabbal 'Alaamiin. Akhir kata, peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan dalam penyelesaian studi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan datang dari diri pribadi peneliti.

Makassar, 24 Maret 2023

Nur Waina Fattah

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene)

Nur Waina Fattah
Ratna Ayu Damayanti
Muhammad Istiyansyah Ulman Idris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat kausalitas dengan sampel sebanyak 30 sampel dan setiap sampel diwakili oleh 2 Responden. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS, AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF DAILY GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS (Case Study on Majene Local Government Regional Apparatus Organization)

Nur Waina Fattah
Ratna Ayu Damayanti
Muhammad Istiyansyah Ulman Idris

This study aims to determine the effect of human resource competence, application of accounting information systems, and internal control systems on the quality of local government financial reports. This research was conducted at the Majene Regency government regional apparatus organization in 2023. This study uses a quantitative method that is causal in nature with a sample of 30 samples and each sample is represented by 2 respondents. The data collection method in this study used a questionnaire in the form of a statement. The data analysis used in this research is multiple linear regression. Based on the results of data analysis, it shows that partially or simultaneously human resource competence, application of accounting information systems, and internal control systems have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.

Keyword: Human Resources Competence, Implementation of Accounting Information Systems, Internal Control Systems, Quality of Local Government Financial Statements.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasar Teori	15
2.1. 1 Teori Keagenan	15
2.1. 2 Kualitas Laporan Keuangan.....	16
2.1. 3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.1. 4 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	19
2.1. 5 Sistem Pengendalian Internal	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Penelitian	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu	28

3.3	Populasi dan Sampel	28
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
3.6.1	Variabel Penelitian	30
3.6.2	Definisi Operasional	30
3.7	Instrumen Penelitian.....	33
3.8	Analisis Data	34
3.8.1	Analisis Data Deskriptif	34
3.8.2	Uji Kualitas Data.....	35
3.8.2.1	Uji Validitas.....	35
3.8.2.2	Uji Reliabilitas	36
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.8.3.1	Uji Normalitas	36
3.8.3.2	Uji Multikolinearitas.....	37
3.8.3.3	Uji Heteroskedastisitas	37
3.8.4	Pengujian Hipotesis.....	38
3.8.4.1	Uji Koefisien Determinan (R ²)	39
3.8.4.2	Uji Simultan (Uji F).....	39
3.8.4.3	Uji Parsial (Uji t).....	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2	Karakteristik Responden.....	42
4.3	Analisis Deskriptif Pernyataan	44
4.3.1	Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	44
4.3.2	Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.....	44
4.3.3	Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	45
4.3.4	Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	46
4.4	Hasil Uji Kualitas Data	47
4.4.1	Hasil Uji Validitas	47

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas	48
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	49
4.5.1 Hasil Uji Normalitas	49
4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	53
4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinan	54
4.6.2 Hasil Uji Simultan	55
4.6.3 Hasil Uji Parsial	56
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.7.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	58
4.7.2 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	61
4.7.3 Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan	63
BAB IV PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	HALAMAN
1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene TA 2018, 2019 dan 2020	11
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	42
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	43
4.4 Analisis Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia	44
4.5 Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	44
4.6 Analisis Deskriptif Sistem Pengendalian Internal	45
4.7 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan	46
4.8 Hasil Uji Validitas	47
4.9 Hasil Uji Reliabilitas	49
4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	51
4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	53
4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	54
4.13 Hasil Uji Simultan.....	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1.1 Opini Audit Pemerintah Pusat	4
1.2 Temuan Audit dan Tindak Lanjut	5
2.1 Kerangka Penelitian	23
4.1 Hasil Uji Normalitas	50
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Biodata	72
2. Penelitian Terdahulu	74
3. Kuesioner Penelitian	81
4. Rekapitulasi Jawaban Responden	86
5. Karakteristik Responden	89
6. Analisis Statistik Deskriptif	90
7. Hasil Uji Kualitas Data	92
8. Hasil Uji Asumsi Klasik	97
9. Hasil Uji Hipotesis	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibelahan negara di dunia selama bertahun-tahun telah menetapkan standar pelaporan keuangan di wilayah masing-masing. Namun, karena terjadinya perdagangan internasional dan perdagangan di antara negara-negara yang semakin meningkat membawa kolaborasi di era globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkannya keseragaman dalam standar yang memandu laporan keuangan sehingga pernyataan tersebut akan tetap dapat dipahami dan memberikan informasi yang sama kepada pengguna di seluruh dunia. Kebutuhan untuk pengembangan standar akuntansi terpadu telah menjadi pendorong utama IPSAS untuk pelaporan keuangan sektor publik (Heald, 2003). Sama halnya dengan penjelasan Opanyi (2016) bahwa adanya peningkatan transaksi internasional antarnegara menekankan agar perlunya transparansi, keseragaman, dan komparabilitas dalam standar pelaporan keuangan sektor publik.

IPSAS adalah norma yang mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan. Pengembangan IPSAS berawal dari profesi akuntansi sebagai cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lembaganya dengan meningkatkan dan menstandarisasi pelaporan keuangan (Delloitte, 2013). IPSASB mengeluarkan IPSAS yang berhubungan dengan pelaporan keuangan berdasarkan basis kas dan basis

akrual. Ini sangat ideal untuk semua pelaporan keuangan publik untuk mengadopsi pelaporan keuangan berbasis akrual.

Banyak negara berkembang, khususnya di Afrika Sub-Sahara, dicirikan oleh korupsi besar-besaran, kemiskinan, dan tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah (Olayinka, 2016). Misalnya, *Transparency International* (2015) memberi peringkat Nigeria 136 dari 175 negara dalam indeks persepsi korupsi berdasarkan persepsi mereka tentang transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah Implementasi anggaran yang buruk dan kurangnya akuntabilitas di sektor publik Nigeria. (Ibanuchuka dan James, 2014).

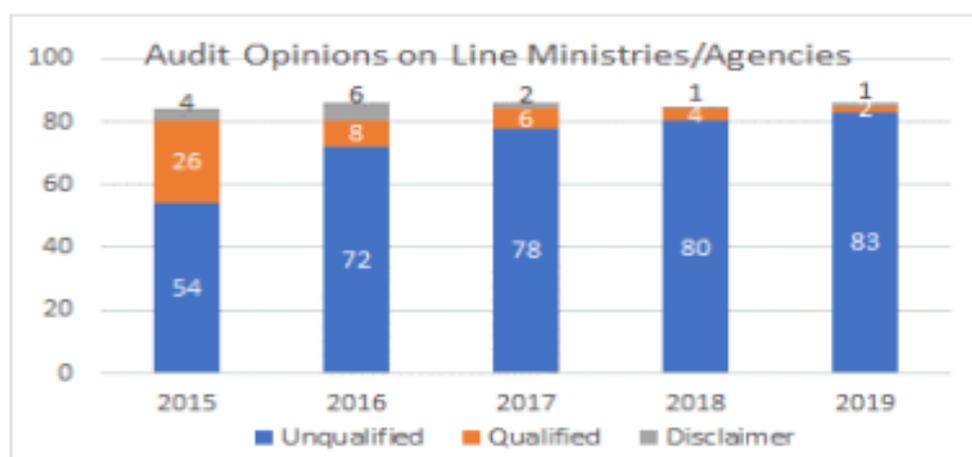
Seperti halnya di Indonesia, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir (Tiurmaida et al., 2021). Jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian juga meningkat tajam sejak tahun 2015. Meskipun kualitas pelaporan ini lebih baik, terutama pada tahun 2020, di mana hanya pemerintah pusat yang dinyatakan memenuhi syarat dalam pelaporan keuangannya, layanan informasi publik masih menghadapi berbagai masalah. Dalam hal ini, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas seharusnya berdampak pada kualitas pelayanan publik (Furqan et al., 2020). Namun nyatanya, masyarakat merasakan bahwa layanan publik masih berbelit-belit dan sulit dijangkau.

Meskipun opini wajar tanpa pengecualian kini berlimpah di antara pemerintah pusat Indonesia (Gambar 1.1), temuan dan implikasi audit, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), harus lebih diperhatikan. Temuan audit pada dasarnya mengungkapkan beberapa masalah

dalam kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, inefisiensi, ketidakefektifan, dan praktik pemerintah yang tidak ekonomis dalam mengelola anggaran negara (BPK-RI, 2021). Sebagai auditor eksternal, BPK-RI mengusulkan evaluasi struktur pengendalian internal dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah. Temuan audit juga menunjukkan adanya potensi kecurangan, ketidakpatuhan, dan penyalahgunaan uang negara. BPK-RI selanjutnya mengusulkan rekomendasi temuan audit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tindak lanjut audit akan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan keuangan organisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Gambar 1.2 di bawah menunjukkan bahwa tindakan perbaikan lembaga pemerintah belum optimal. Seperti yang terlihat, per 30 Juni 2020, persentase rekomendasi yang belum selesai masih tinggi, sekitar 42%, sementara jumlah temuan masih di atas beberapa ribu item. Angka-angka ini mungkin bertentangan dengan fakta bahwa hampir semua kementerian dan lembaga pemerintah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 : Opini Audit Pemerintah Pusat



Gambar 1.2 : Temuan Audit dan Tindak Lanjut

Salah satu upaya pemerintah dalam menyempurnakan sistem akuntansi adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan tentang pengelolaan keuangan negara. Reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 Undang-Undang Keuangan negara di tahun 2003-2004, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan menggunakan pendekatan Cash Towards Accrual (CTA) dalam sistem akuntansinya. Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*), tidak lagi cash towards accrual selambat-lambatnya tahun 2015 (Accounting.binus, 2021). Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Diani (2014) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya sistem pengendalian internal. SDM yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah harus memahami bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Karmila *et.al* (2014) keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta menurut Adhitama (2017) laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.

Diani (2014) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Adanya laporan keuangan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada publik mengenai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dan kemana dana tersebut dibelanjakan (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021).

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Dewi (2020) pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan OPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et. al* (2020) menunjukkan bahwa

sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh karmila *et. al* (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

Menurut Diani (2014), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional dalam menunjang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et. al* (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pada pemerintah kabupaten pariaman.

Hal ketiga yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya sistem pengendalian internal yang baik. Permasalahan yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidaktahuan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian internal mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pengendalian internal sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik tentang kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. pengendalian internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anuruddha dan Mahanamahewa (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Sri Lanka. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda *et. al* (2018) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten bandung barat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah kabupaten limah puluh kota. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et. al* (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Majene memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang sekiranya harus terus diperbaiki oleh pemerintah daerah Majene terutama kaitannya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Berikut hasil pemeriksaan BPK

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk tahun 2019, dan 2020.

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene TA 2018, 2019 dan 2020

Tahun	Permasalahan
2018	1 Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang belum memadai
	2 Pengelolaan dana kapitasi JKN di 11 Puskesmas belum memadai
	3 Realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang memadai
	4 Kelebihan pembayaran biaya modal senilai Rp. 269.030.000
2019	1 Adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD
	2 Pengelolaan BMD yang belum tertib
	3 Tidak optimalnya Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan RSUD dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengadaan barang
2020	1 Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS Kesehatan belum memadai
	2 pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai
	3 Pengelolaan Aset Tetap belum tertib

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan seperti pengelolaan kas di bendahara pengeluaran belum memadai, pengelolaan dana kapitasi JKN di 11 Puskesmas belum memadai, dan adanya realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang memadai. pada tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah kabupaten Majene seperti masih adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD, pengelolaan BMD yang belum tertib dan kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pengadaan barang di di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan RSUD. Sedangkan di tahun 2020 terdapat beberapa

permasalahan seperti Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS Kesehatan belum memadai, pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai, dan Pengelolaan Aset Tetap belum tertib. Berdasarkan hal tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten majene)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, peneliti juga berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Mejene yang dipengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menggambarkan variabel-variabel yang diperhatikan dalam upaya penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Majene.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah Majene. Variabel yang akan diuji pada penelitian ini adalah penerapan sistem informasi

akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian, hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini merupakan simpulan dari hasil penelitian, serta saran yang dapat membangun pihak yang terkait atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, dimana agen bertindak sebagai pihak pengelola perusahaan sedangkan prinsipal merupakan pihak pemilik serta keduanya terikat dalam sebuah kontrak (Ternalemta *et. al*, 2021). Teori keagenan atau agensi berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama dalam teori ini ialah bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberikan hak (Prinsipal) yaitu Investor perusahaan dan pihak yang berwenang (agen) dalam hal ini manajer perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja yang sama disebut *nexus of contract*. Implikasi dari penerapan teori ini dapat mengarah pada perilaku yang efektif atau perilaku yang oportunistik terhadap agen. Dalam hal pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen dengan kewajiban memberikan informasi yang berguna bagi kepada pengguna informasi dalam hal ini adalah publik.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene berperan sebagai agen yang diwajibkan untuk memberikan laporan kepada prinsipal atau masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas. Masalah keagenan sering muncul ketika pelaksana (agen) cenderung memaksimalkan kepentingan satu sama lain yang timbul dari proses penganggaran, pengambilan keputusan, sampai penyajian laporan keuangan yang wajar untuk menunjukkan kepada

pihak legislatif dan rakyat bahwa kinerja mereka berjalan dengan baik (Riandani, 2017).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas secara terstruktur. Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi (Gasperz, 2019).

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau beberapa entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sebuah laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja oleh para pengguna informasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 bagian kerangka konseptual, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi peristiwa masa yang akan datang, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktivec value*), yaitu informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan pengguna.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang menjadi latar belakang setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar terhindar dari kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Andal berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi yang disajikan menggambarkan dengan jujur setiap transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak terhadap kepentingan tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunad an dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, tetapi juga kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi pegawai yang dimiliki Kasubbag Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun staf keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempermudah pekerjaan, mahir, dan memahami sistem pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelolanya. Sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas dengan waktu, andal, dan mudah dipahami oleh para pengguna.

2.1.4 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Majene di dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan suatu sistem bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan keuangan, OPD Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian Internal adalah sistem yang dilaksanakan secara menyeluruh di pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan memberikan kepastian yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Ernawati dan Budiyo (2019) pengendalian internal adalah suatu sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi dan

memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik-praktik kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang memungkinkan pencapaian tujuan dan memastikan atau memberikan informasi keuangan yang andal dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 menerangkan bahwa unsur pengendalian internal dalam peraturan pemerintah mengacu pada unsur sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di suatu negara, antara lain: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan akan berguna jika informasi yang disajikan dapat digunakan bagi pengambil keputusan pada waktu yang tepat. Jika ada penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan referensi dalam penyusunan tulisan ini, peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memiliki gambaran dalam pembuatan hipotesis untuk kemudian melaksanakan penelitian tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dimana hasil dari peneliti A yang mendapatkan hasil bahwa variabel yang sama dengan variabel independen yang akan diteliti oleh peneliti berpengaruh dengan variabel dependen yang diangkat oleh Peneliti. Namun, dari hasil peneliti B bahwa ternyata variabel independen yang akan diteliti oleh peneliti tidak berpengaruh dengan variabel

dependen yang diangkat oleh Peneliti. Oleh karena itu, peneliti membandingkan hasil penelitian tersebut dari beberapa literatur yang ada.

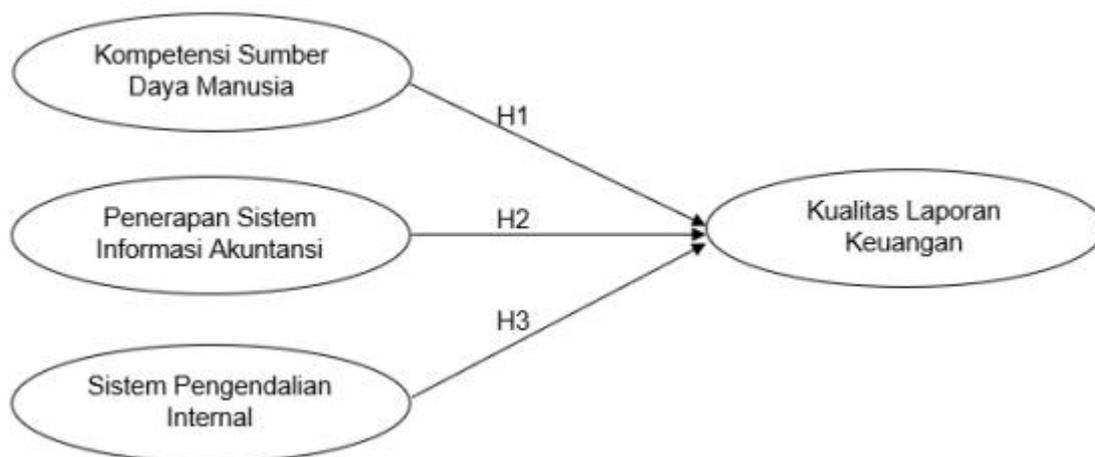
Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pada variabel ini penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et. al* (2020), Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Lisda *et. al* (2018), Surya Adhitama (2017), Riedy Riaindani (2017), Sairi *et. ail* (2014), dan Dian Irma Diani (2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et. al* (2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pada variabel ini penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et. al* (2020), Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Karmila *et. al* (2014), Lisda *et. al* (2018), dan Sairi *et. ail* (2014) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Irma Diani (2014) dan Riedy Riaindani (2017) menunjukkan hasil bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Sistem Pengendalian Internal, Pada variabel ini penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Wayan Tiya Lestari & Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Lisda *et. al* (2018), dan Riedy Riandani (2017) menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et. al* (2014) menunjukkan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan sistem informasi akuntansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan (Y). oleh karena itu, kerangka pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian

Keterangan :

—————> = Uji Parsial

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik, kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan, karena jika memiliki kemampuan menyusun

laporan keuangan dengan baik maka hasil kinerja juga akan baik. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, kompetensi sumber daya manusia yang baik akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et. al* (2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Diani (2014), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional dalam menunjang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et. al* (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem

informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten jembrana. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H2 : Penerapan Sistem Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ernawati dan Budiyo (2019) pengendalian internal adalah suatu sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi dan memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik-praktik kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang memungkinkan pencapaian tujuan dan memastikan atau memberikan informasi keuangan yang andal dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anuruddha dan

Mahanamahewa (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Sri Lanka. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisda *et. al* (2018) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten bandung barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik tentang kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.